



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
KELOMPOK
RENTAN

LAPORAN KINERJA

2022





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022 dapat disusun. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola kinerja organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan sumber informasi untuk perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum, kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan selama tahun 2022 berhasil dicapai dengan baik. Kami mengapresiasi seluruh *stakeholder* yang telah bekerja sama dengan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan. Harapan kami agar kerjasama yang baik ini dapat kita teruskan, dengan tujuan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai sumber informasi khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta sumber referensi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

**DIREKTUR,
PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN**

DEWI SUHARTINI

DAFTAR ISI

1

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

2

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

1

TUGAS DAN FUNGSI

2

STRUKTUR ORGANISASI

3

KOMPOSISI SDM

4

ISU STRATEGIS

5

SISTEMATIKA

6

3

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

7

RENCANA KERJA

9

PERJANJIAN KINERJA

11

ANGGARAN

15

4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

16

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

34

REALISASI ANGGARAN

38

ANALISIS EFISIENSI

39

KESIMPULAN

40

5

BAB IV PENUTUP

TINDAK LANJUT

40

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui 3 Sasaran Kinerja yang dapat diukur melalui 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagai berikut:

SASARAN KINERJA 1

Keberhasilan penyaluran bantuan sosial Program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar

IKK 1.1

TARGET: 99% REALISASI: 99,25 KINERJA: 100%

Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran

IKK 1.2

TARGET: 99% REALISASI: 99,95 KINERJA: 100%

Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat nilai

IKK 1.3

TARGET: 99% REALISASI: 98,39 KINERJA: 99.38%

Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat waktu

IKK 1.4

TARGET: 99% REALISASI: 87,76 KINERJA: 88,64%

Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan pangan dan gizi

SASARAN KINERJA 2

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

IKK 2.1

TARGET: 87 REALISASI: 97,99 KINERJA: 112%

Nilai Kinerja Anggaran (SMART)

IKK 2.2

TARGET: 77 REALISASI: N.A KINERJA: N.A

Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

SASARAN KINERJA 3

Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

IKK 3.1

TARGET: 90 REALISASI: 92,26 KINERJA: 102,5%

Nilai Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)



“Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana ini kemudian harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan.



Pada 2020, program BPNT berubah menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako sebesar Rp.200.000,-/Keluarga/Bulan, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal.

Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

“



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan merupakan Unit Kerja Eselon II yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemensos, sebagai salah satu unit eselon II yang baru berdiri tahun 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Direktorat ini memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maupun pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelompok rentan.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan melaksanakan kegiatan yang merupakan salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program bantuan sosial sembako, yang sebelumnya tugas ini diampu oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dalam melaksanakan peran untuk mendukung program Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan melalui 4 Tim Kelompok Kerja, yaitu:

1. Tim Data
2. Tim Penyaluran
3. Tim Pendampingan dan Respon Kasus, dan
4. Tim TU, Persuratan, Keuangan dan Perencanaan



TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, sesuai Pasal 100 dan Pasal 101 Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

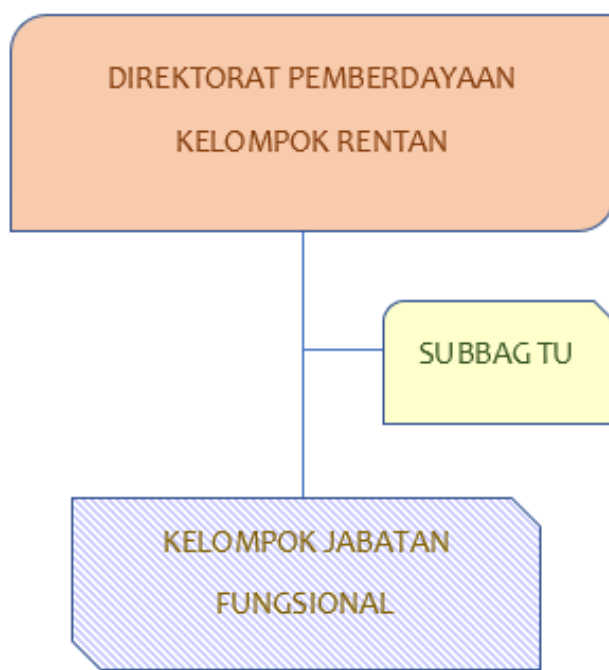
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelompok rentan.

b. Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pemberdayaan kelompok rentan;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, sesuai Pasal 100 dan Pasal 101, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan sesuai substansinya memiliki 3 output kegiatan yang meliputi:

1. Pemberdayaan kelompok rentan keluarga penerima manfaat melalui pemberian bantuan sosial Program Sembako
2. Pemberdayaan kelompok rentan keluarga penerima manfaat melalui pemberian bantuan sosial BLT BBM (sebagai kompensasi KPM terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak)
3. Pendampingan kelompok rentan keluarga penerima manfaat melalui ragam intervensi, seperti monitoring dan evaluasi, serta respon kasus

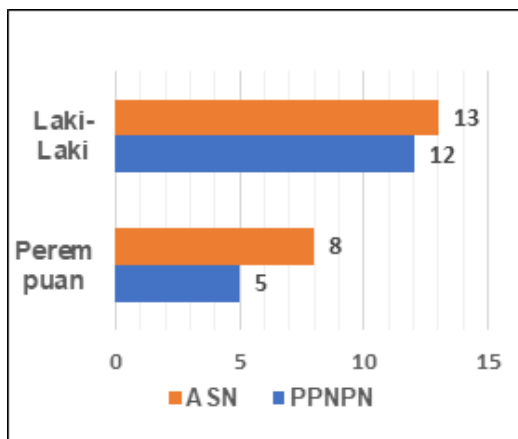
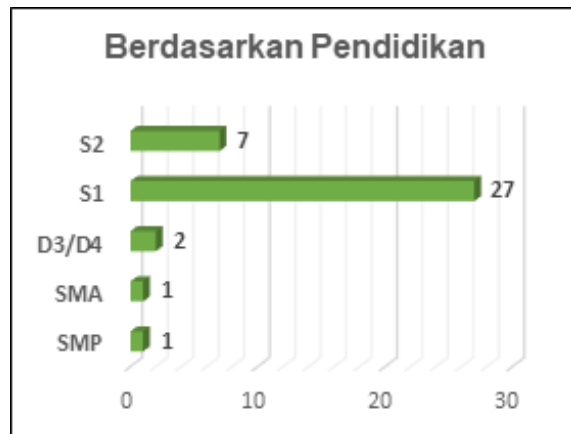
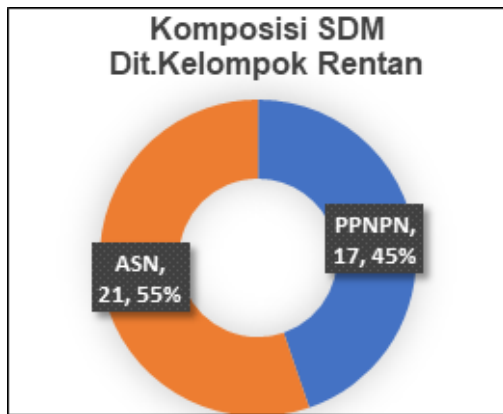
STRUKTUR ORGANISASI

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan untuk mencapai target sesuai Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

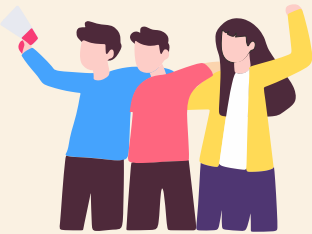
Jumlah Sumber Daya Manusia pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022 adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 21 orang dan PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sebanyak 17 orang.



Sumber Data: Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Desember Tahun 2022

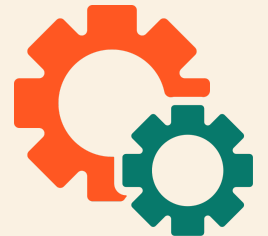
ISU STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Sosial Tahun 2020–2024, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan menghadapi sejumlah isu strategis, antara lain:



a. Masih belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia yakni Kompetensi SDM yang proposional sesuai kebutuhan yang ideal untuk meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien pada masing-masing kelompok kerja agar pengelolaan kegiatan menjadi optimal

b. Penetapan regulasi terkait bantuan sosial program sembako, seperti Perjanjian Kerja Sama, Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan.



c. Dalam hal pelaksanaan pemanfaatan bantuan sosial sembako bagi KPM agar menjadi optimal, diperlukan adanya penetapan pendamping pada program sembako.

SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan ini disajikan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Komposisi SDM
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Anggaran

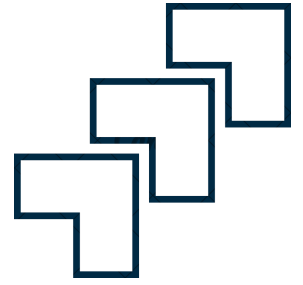
BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisis Efisiensi

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Tindak Lanjut

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

VISI

Mengacu pada visi Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, maka visi dari Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan adalah:

"Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar keluarga miskin dan kelompok rentan"



MISI

Mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk menurunkan kemiskinan terhadap Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan, melalui misi:

"Mengembangkan layanan dan rujukan terpadu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan"

TUJUAN STRATEGIS

TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL SEPERTI TERTUANG PADA RENSTRA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL YAITU SEBAGAI BERIKUT:

“MENINGKATKAN KEBERHASILAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO YANG TEPAT SASARAN, NILAI DAN WAKTU SERTA TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN HAK DASAR”

RUMUSAN TUJUAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN BERDASARKAN RENSTRA DITJEN DAYASOS ADALAH:

1. MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN KPM MELALUI PEMENUHAN SEBAGAI KEBUTUHAN PANGAN
2. MEMBERIKAN GIZI YANG CUKUP DAN SEIMBANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MERUPAKAN KELUARGA MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO KETEPATAN SASARAN, WAKTU DAN NILAI



RENCANA KERJA

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari program pemberdayaan sosial, maka perlu pencapaian sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2022-2024. Masing-masing program memiliki sasaran program yang pengukurannya melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

IKK ini digunakan untuk mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai pada setiap tahun. Berikut adalah Rencana Kerja Indikator dan Target Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



RENCANA KERJA INDIKATOR DAN TARGET

Rencana Kerja Indikator dan target

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		
				2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar.	IKK. 1.1	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran	99%	99%	99%
		IKK. 1.2	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial nilai	99%	99%	99%
		IKK. 1.3	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang mendapatkan bantuan sosial waktu	99%	99%	99%
		IKK. 1.4	Persentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan gizi	99%	99%	99%
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	IKK. 2.1	Nilai Kinerja Anggaran (SMART).	87	87	87
		IKK. 2.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	77	80	80
3	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	IKK. 3.1	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.	90	90	90

PERJANJIAN KINERJA 2022

**AWAL
BULAN SEPTEMBER**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Suhartini
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Suharto
Jabatan : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial


Edi Suharto

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan


Dewi Suhartini

PERJANJIAN KINERJA 2022

LAMPIRAN PK AWAL SEPTEMBER

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTUR PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keberhasilan penyaluran bantuan sosial Program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	1. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	97%
		2. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Nilai	95%
		3. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Waktu	95%
		4. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Gizi	95%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, dan umum	1. Nilai IKPA Dit Pemberdayaan Kelompok Rentan	87
		2. Persentase (%) Pengelolaan Anggaran	97%
		3. Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	97%
		4. Jumlah dokumen/Laporan urusan Kepegawalan, Keuangan, Perencanaan dan Umum	4 Dokumen

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako

Rp.28.191.006.288.000

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan

Edi Suharto

Dewi Suhartini

PERJANJIAN KINERJA 2022

**PK TERAKHIR
BULAN OKTOBER**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Suhartini
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Suharto
Jabatan : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

Edi Suharto

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan

Dewi Suhartini

PERJANJIAN KINERJA 2022

LAMPIRAN PK TERAKHIR BULAN OKTOBER

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTUR PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1	Keberhasilan penyaluran bantuan sosial Program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	1. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 2. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Nilai 3. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Waktu 4. Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang terpenuhi kebutuhan Pangan dan Gizi	99% 99% 99% 99%
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	1. Nilai Kinerja Anggaran (SMART). 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	87 77
3	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	1. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.	90

Kegiatan	Anggaran (Rp)
6896. Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako	Rp.28.191.006.288.000
1. QAH. Pelayanan Publik Lainnya	Rp. 61.963.488.000
QAH.101.Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Rp. 61.963.488.000
2. QEB. Bantuan Keluarga	Rp.28.129.042.800.000
QEB.101.KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako (PEN)	Rp.15.167.037.880.000
QEB.102.KPM Yang Memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM (PEN)	Rp.12.962.005.000.000

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Edi Suharto

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan



Dewi Suhartini

D. ANGGARAN

KRONOLOGI ANGGARAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN TAHUN 2022

Pagu Awal:

14.742.125.743.000
B. BARANG : 68.200.343.000
B. BANSOS : 14.673.925.400.000

Revisi DJA OTK Baru

Revisi BLT BBM

27.704.130.743.000
B. BARANG : 640.205.343.000
B.BANSOS : 27.063.925.400.000

Revisi Tambahan BLT BBM

Revisi DJA

28.191.006.288.000
B. BARANG : 1.127.080.888.000
B. BANSOS : 27.063.925.400.000

1. Revisi OTK Lama PFM 493 M untuk pengganti biaya distribusi PT. POS TW 1 dan TW 2
2. Revisi Realokasi dari OTK Lama dayasos ke OTK Baru Dayasos 843 Juta untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan program bansos
3. Realokasi anggaran sebesar Rp 7 M untuk penambahan alokasi tali asih TKSK ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

Revisi DJA

28.191.006.288.000
B. BARANG : 1.127.080.888.000
B. BANSOS : 27.063.925.400.000

Revisi Buka Blokir Biaya Distribusi untuk 83 Kab/kota



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN KELOMPOK
RENTAN 2022



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



SASARAN KINERJA 1

Keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar.
yang diukur dari 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

IKK 1.1 **PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM SEMBAKO YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO TEPAT SASARAN**

Target	99%
Realisasi	99,25%
Capaian Kinerja	100%

IKK 1.2 **PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM SEMBAKO YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL TEPAT NILAI**

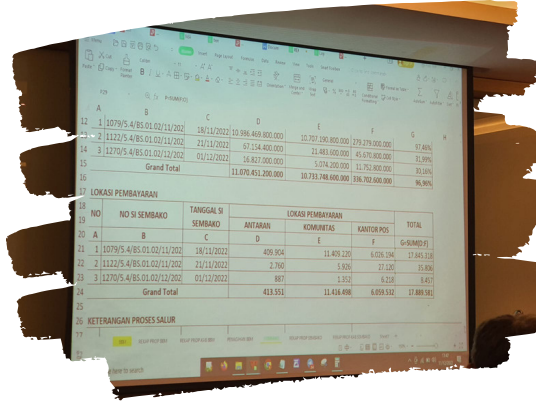
Target	99%
Realisasi	99,95%
Capaian Kinerja	100%

IKK 1.3 **PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM SEMBAKO YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL TEPAT WAKTU**

Target	99%
Realisasi	98,39%
Capaian Kinerja	99,38%

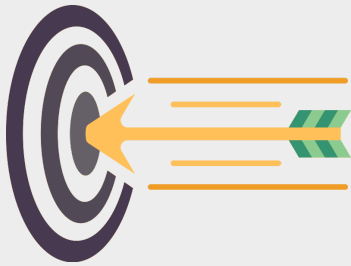
IKK 1.4 **PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM SEMBAKO YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PANGAN DAN GIZI**

Target	99%
Realisasi	87,76%
Capaian Kinerja	88,64%



IKK 1.1

Capaian Kinerja : 100%



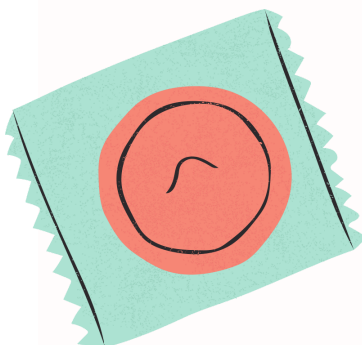
SASARAN DAN TARGET

- Sasaran Program Sembako TA 2022 adalah sebanyak **18.800.000 KPM** keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS
- Dengan sebaran di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.



METODE

- Data KPM program sembako bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
- Penyaluran program sembako tahun 2022 dilaksanakan bekerja sama dengan PT POS
- Pendampingan dan pemantauan program sembako dilaksanakan oleh pendamping sosial dan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota



ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penghitungan Realisasi = $n / T \times 100\%$

n = Jumlah KPM Penerima Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran (18.658.193 KPM)

T = Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (18.800.000 KPM)

- Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako tahun 2022 yang sukses transaksi adalah sejumlah 18.658.193 / 18.800.000 KPM = 99,25% dari target

IKK 1.2

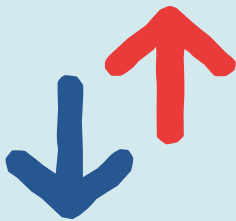
Capaian Kinerja : 100%

NILAI BANTUAN



- Keberhasilan tepat nilai penyaluran bansos merupakan kesesuaian antara jumlah nominal penyaluran dengan data salur KPM
- Nilai bantuan sosial program sembako sejumlah Rp 200.000,- setiap bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah

METODE



- Penyaluran bantuan sosial sembako bulan September s.d Desember 2022 disalurkan secara tunai oleh Pos Penyalur
- Rekonsiliasi dilakukan oleh stakeholders (Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial, mitra penyalur, Inspektorat Jenderal, dan Staf Khusus Menteri yang dilaksanakan setelah 30 hari masa penyaluran.

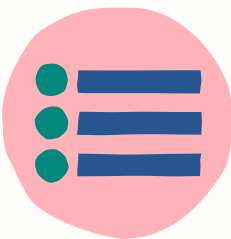
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penghitungan Realisasi = $n / T \times 100\%$

n = Jumlah KPM Penerima Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Nilai (18.790.332 KPM)

T = Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (18.800.000 KPM)

- Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 berhasil salur berjumlah **18.790.332 KPM** sesuai Berita Acara Rekon Periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.





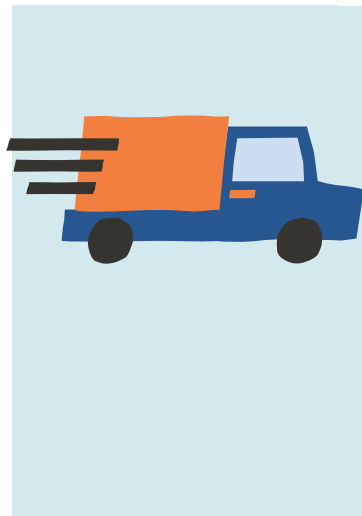
IKK 1.3

Capaian Kinerja : 99.38%



TARGET

- Waktu penyaluran bantuan sosial sembako bulan September s.d Desember 2022 dilaksanakan setiap bulannya melalui DIPA Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan TA 2022.



METODE

- Penyaluran dana bantuan sosial sembako dilakukan pemindahbukuan oleh BNI melalui RPL (Rekening Penampungan Lainnya) ke rekening PT Pos Indonesia (Persero) melalui surat Instruksi yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana / SP2D.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penghitungan Realisasi = $n / T \times 100\%$

n = Jumlah KPM Penerima Program Sembako yang mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Waktu (18.496.511 KPM)

T = Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (18.800.000 KPM)

- Per tanggal 31 Desember 2022 KPM yang berhasil transaksi sebanyak 18.496.511 KPM sesuai Berita Acara Rekon Penyaluran Program Sembako Periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

FAKTOR PENDUKUNG

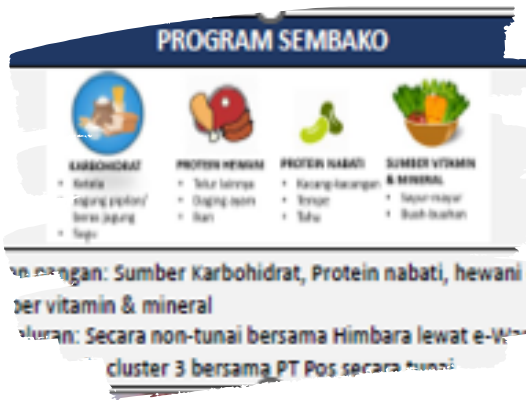
- Mitra penyalur, yakni PT Pos Indonesia mampu melakukan proses pendistribusian bantuan yang dilaksanakan di berbagai kota di seluruh Indonesia
- adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah, komunitas-komunitas sehingga mengoptimalkan jangkauan penyaluran ke lokasi-lokasi penerima bantuan.

FAKTOR PENGHAMBAT

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Pos, terdapat beberapa kendala bantuan sosial kepada masyarakat, sebagai berikut:

- Kebijakan vaksin oleh pemerintah
- KPM tidak ditemukan
- KPM di luar kota
- KPM dibawah umur
- KPM ke luar negeri
- KPM mampu atas info Pemda
- kpm meninggal KK tunggal
- KPM menolak KPM pindah alamat
- KPM PNS, Polri, DPR, Pemda
- KPM sudah dapat BLT





IKK 1.4

Capaian Kinerja : 88,64%

TARGET



- Keluarga Penerima manfaat bantuan sosial sembako yang memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam pemenuhan gizi

METODE



Mekanisme penyaluran bantuan untuk memastikan KPM membelanjakan bahan pangan, telah dituangkan dalam Juknis Pelaksanaan Program Sembako No 120/5/HK.01/8/2022 huruf F, bahwa dalam hal pembelian barang KPM penerima bantuan sosial program sembako harus mempergunakan bantuan untuk membeli barang berupa bahan pangan.

Pelaksanaan Monev telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan yang dilaksanakan pada akhir bulan Oktober dengan jumlah 352 responden KPM penerima bansos sembako pada 26 Provinsi di 34 Kab/Kota untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil kegiatan penyaluran bantuan sosial Sembako.

Identitas Responden



**512
KPM**

Berdasarkan hasil Monev dan pengujian sementara yang dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Februari 2023 kepada KPM penerima bansos sembako pada 26 Provinsi di 34 Kab/Kota untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil kegiatan penyaluran bantuan sosial Sembako tahun 2022.

Sebaran Responden

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota
1	Aceh	1	Aceh tenggara
2	Bali	2	Gianyar
		3	Tabanan
3	Banten	4	Kota Tangerang
4	Bengkulu	5	Kota Bengkulu
5	DKI Jakarta	6	Kota Jakarta Selatan
		7	Kota Jakarta Timur
6	Gorontalo	8	Gorontalo
7	Jawa Barat	9	Kota Banjar
		10	Bandung
		11	Kota Bogor
		12	Kota Bandung
8	Jawa Tengah	13	Gunungkidul
		14	Kota Semarang
		15	Kota Cilacap
9	Jawa Timur	16	Kota Malang
10	Kalimantan Timur	17	Kota Samarinda
11	Kep. Bangka Belitung	18	Kota Pangkal Pinang
12	Kepulauan Riau	19	Kota Batam
13	Maluku	20	Kota Ambon

14	NTB	21	Lombok Utara
15	NTT	22	Kota Kupang
16	Papua	23	Asmat
17	Riau	24	Kota Pekanbaru
18	Sulawesi Selatan	25	Bulukumba
		26	Luwu Utara
19	Sulawesi Tenggara	27	Kota Kendari
20	Sulawesi Utara	28	Kota Manado
21	Sumatera Selatan	29	Musi Banyuasin
22	Sulawesi Barat	30	Mamuju
23	Sumatera Utara	31	Kota Medan
24	Kalimantan Barat	32	Kota Pontianak
25	Maluku Utara	33	Kota Ternate
26	Kalimantan Tengah	34	Barito Timur

Sumber: Laporan Hasil Monev
Dit. PKR Th. 2023

Penghitungan sampel diambil berdasarkan metode Krecjie & Morgan

$$n = \frac{X^2 \cdot N \cdot P(1 - P)}{(N - 1) \cdot d^2 + X^2 \cdot P(1 - P)}$$

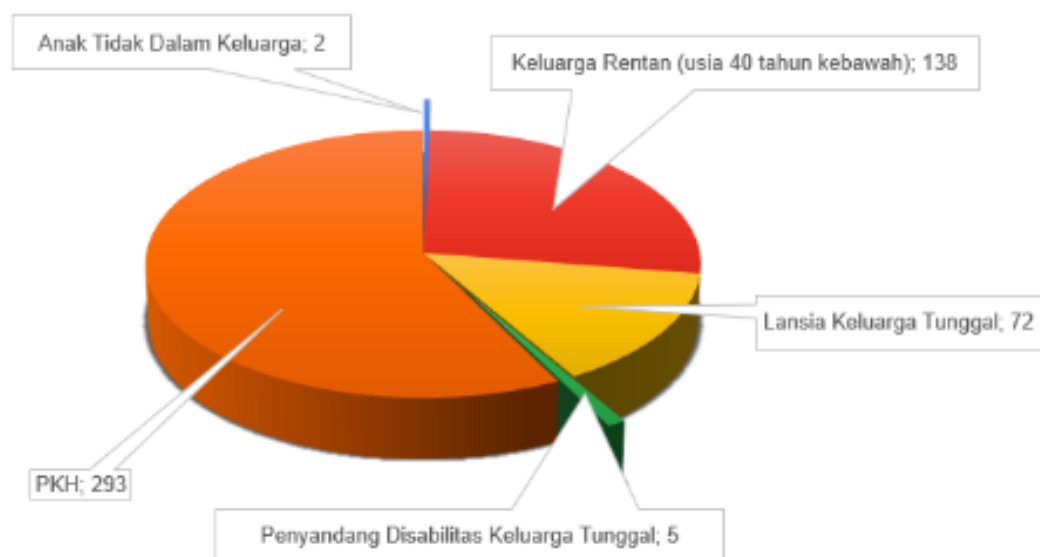
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
X² = Nilai Chi Kuadrat
d = Galat pendugaan
P = Proporsi populasi

DATA RESPONDEN

Jenis Kelamin



Jenis KPM





ANALISIS CAPAIAN KINERJA

$$\text{Penghitungan Realisasi} = n / T \times 100\%$$

n = Jumlah responden yang membelanjakan sembako berdasarkan hasil moneyv (509 KPM)

T = Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (580 KPM)

Pemanfaatan bantuan bansos dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dapat dilihat gambar berikut:



Dari grafik diatas, diketahui bahwa 509 dari 512 KPM (99,4%) responden menyatakan jenis komoditas yang dibeli oleh KPM adalah berupa karbohidrat, protein hewani, prrotein nabati, vitamin, dan mineral yang meliputi; beras, ikan, daging, sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan.

Responden lainnya membelanjakan bantuan sosial untuk membeli salah satu dari komoditas, seperti karbohidrat saja (beras/sejenisnya), karbohidrat dan protein hewani saja, karbohidrat dan protein nabati saja.

PEMANFAATAN PROGRAM BANSOS SEMBAKO



Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial sembako yang memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam pemenuhan gizi yakni penggunaan pembelian bansos sembako untuk bahan pangan yang memiliki kandungan sebagai berikut:

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 120/5/hk.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sembako

1. karbohidrat, meliputi beras, sagu, kentang, jagung, singkong atau bahan pangan karbohidrat lainnya
2. protein hewani, meliputi daging, telur, ikan, ayam atau bahan pangan hewani lainnya
3. protein nabati, meliputi kacang-kacangan, tempe, tahu, atau bahan pangan protein nabati lainnya
4. vitamin dan mineral, meliputi sayuran dan/atau buah-buahan

Tantangan yang dihadapi untuk mengetahui pembelian bantuan sosial agar tepat manfaat adalah belum adanya pendampingan dan pemahaman KPM mengenai apa saja bahan yang harus dibeli KPM untuk memenuhi kebutuhan akan gizinya.

Sehingga diperlukan adanya pendampingan oleh pendamping sosial atau sosialisasi agar KPM memahami dan mengutamakan pembelian bansos yang sesuai.





CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN KINERJA 2

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
yang diukur dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

IKK 2.1 NILAI KINERJA ANGGARAN (SMART)

Target	87
Realisasi	97,99
Capaian Kinerja	112 %

IKK 2.2 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

Target	77
Realisasi	N.A
Capaian Kinerja	N.A



Metode

Aplikasi SMART Kemenkeu digunakan sebagai tools untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks. Aplikasi dengan sistem web-based ini digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penghitungan Realisasi = $n / T \times 100\%$

n = Nilai SMART adalah Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (97,99))

T = Jumlah Nilai yang ditargetkan (87)

Ditjen Pemberdayaan Sosial	418940	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL	85,71
Ditjen Pemberdayaan Sosial	440193	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	98,48
Ditjen Pemberdayaan Sosial	440213	Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	89,85
Ditjen Pemberdayaan Sosial	630859	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	97,56
Ditjen Pemberdayaan Sosial	682033	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	84,7
Ditjen Pemberdayaan Sosial	690556	DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	97,99

Sumber: Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial

Dari Tabel di atas, Nilai Kinerja Anggaran (SMART) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah **97,99**. Sehingga capaian kinerja adalah 112%

IKK 2.2

Metode

Nilai akuntabilitas kinerja merupakan cerminan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara secara efektif, efisien dan ekominis.

Untuk mencapai nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan yang akuntabel harus memenuhi beberapa hal:

- a. merencanakan target kinerja.
- b. menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja.
- c. menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
- d. mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
- d. melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan sebelumnya.

Penghitungan Realisasi = $n / T \times 100\%$

n = Nilai SAKIP (-----))

T = Jumlah Nilai yang ditargetkan (77)

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) belum bisa didapatkan karena Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan merupakan Direktorat baru yang ada pada bulan September 2022, sehingga baru akan dinilai periode tahun depan.

Dokumen Pendukung SAKIP





SASARAN KINERJA 3

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

yang diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

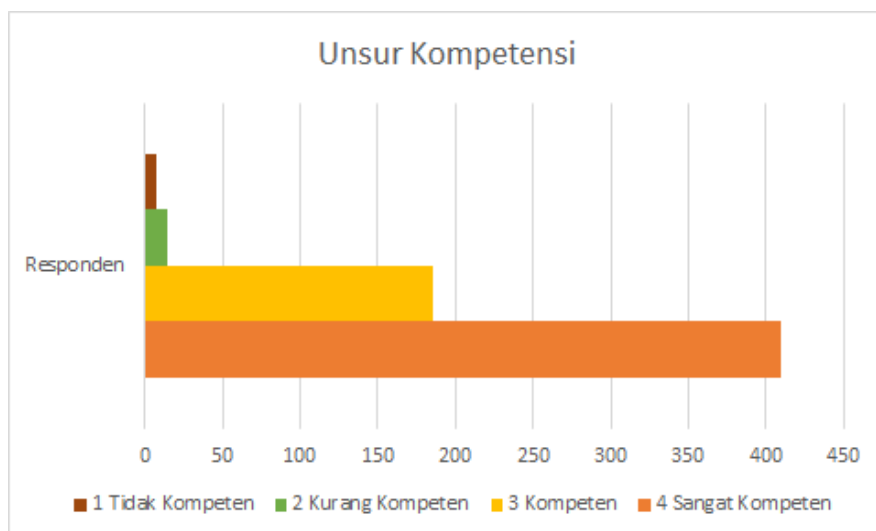
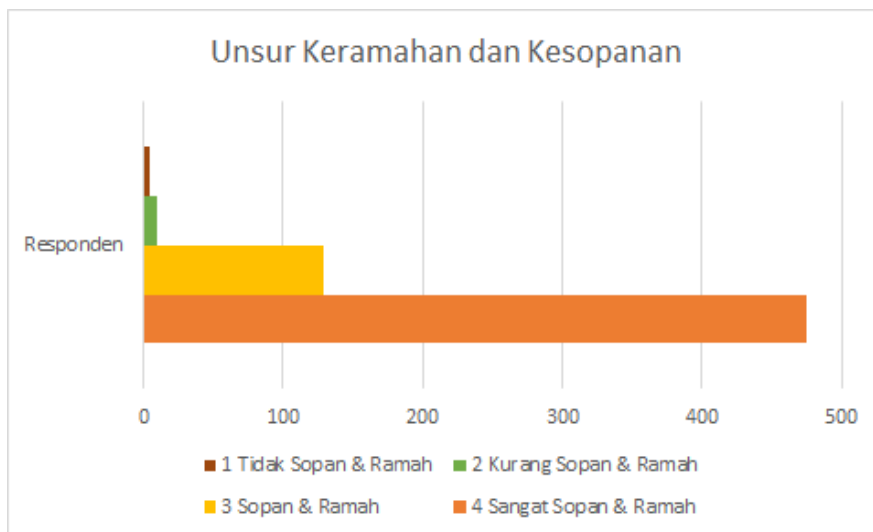
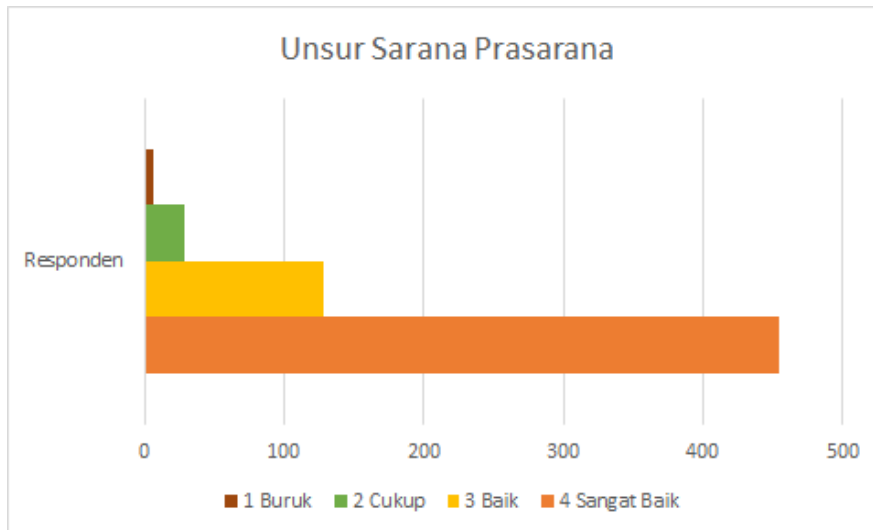
IKK 3.1 NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP LAYANAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

Target	90
Realisasi	92,26
Capaian Kinerja	102,5%

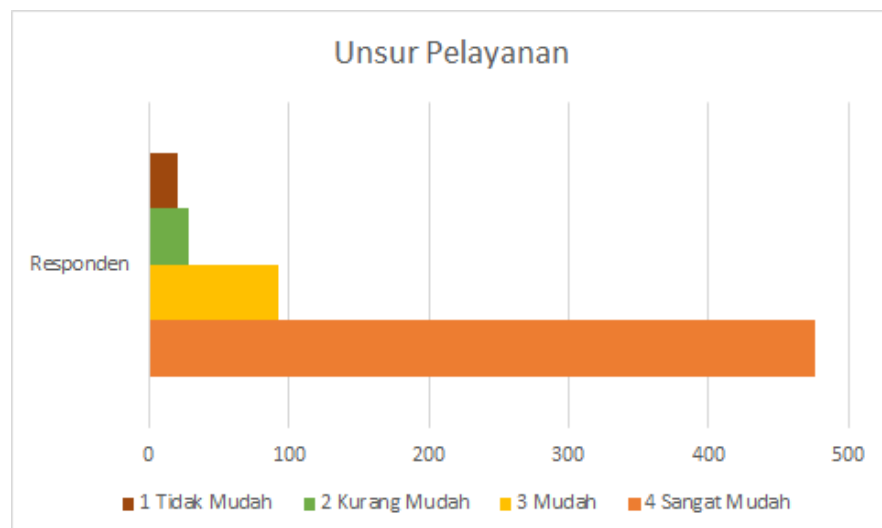
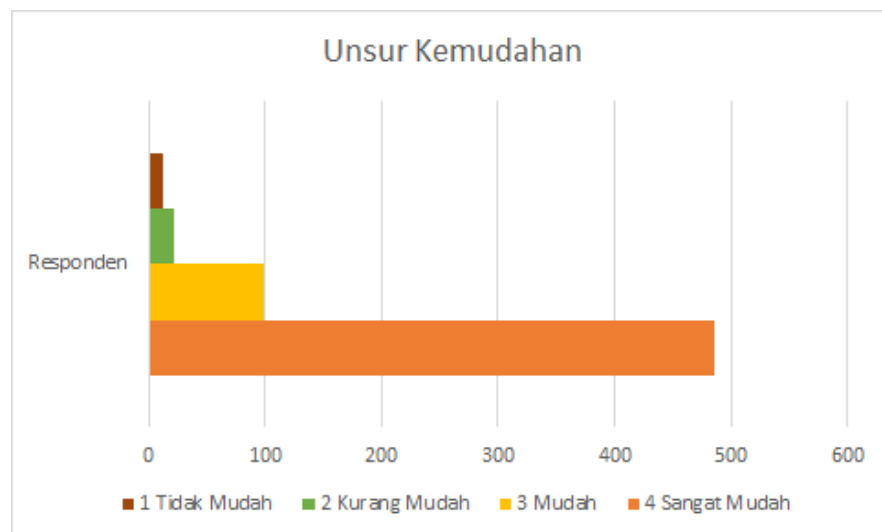
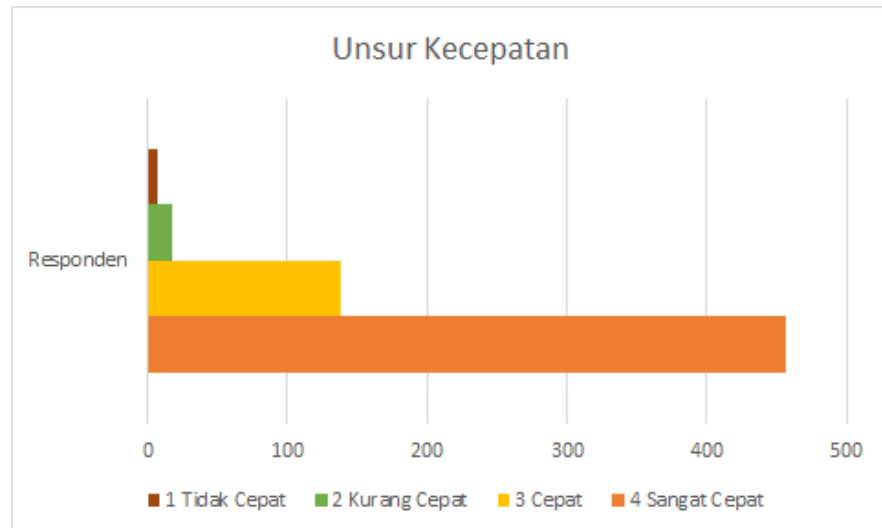
PENGAMBILAN DATA SURVEY

Nama Survei	Survei Kepuasan Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial																													
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.																													
Sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Internal Kementerian Sosial• Kementerian/Lembaga• Organisasi Non Pemerintah• Pemerintah Daerah		<ul style="list-style-type: none">• Pilar Sosial Perorangan• Pilar Sosial Kelembagaan• Masyarakat																											
Tanggal	25 Januari – 6 Februari 2023																													
Link Survei	https://forms.gle/vGaRbMJ9GfMBYhND9																													
Target Layanan	20 Layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial																													
Perhitungan	<ul style="list-style-type: none">• Skala Linkert 1 – 4 (<u>Sangat Baik/Mudah/Cepat, Baik/Mudah/Cepat, Kurang Baik/Mudah/Cepat, Tidak Baik/Mudah/Cepat</u>)• Nilai Bobot dari pembagi 7 (tujuh) unsur sehingga pembobotan 1/7 atau 0,1428, karena ada 7 unsur pertanyaan• Ragam Penilaian: Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Permenpan-RB No.14/2017		<table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>			NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										

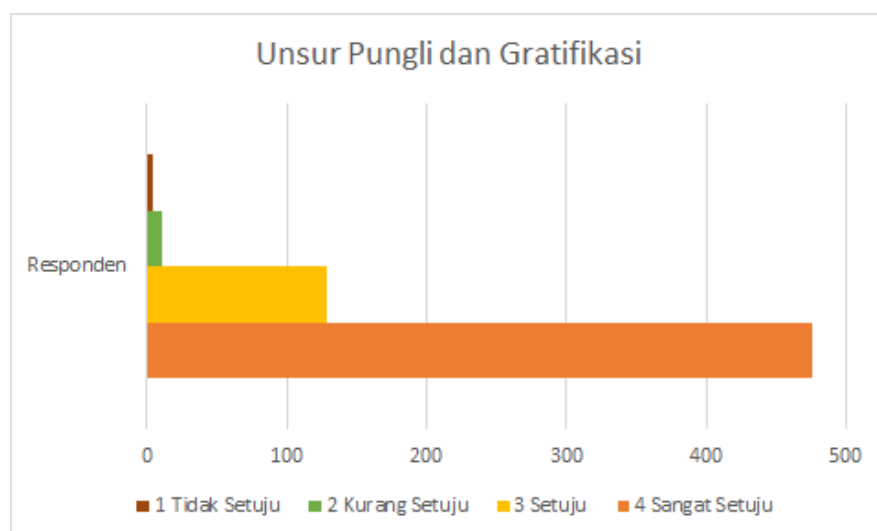
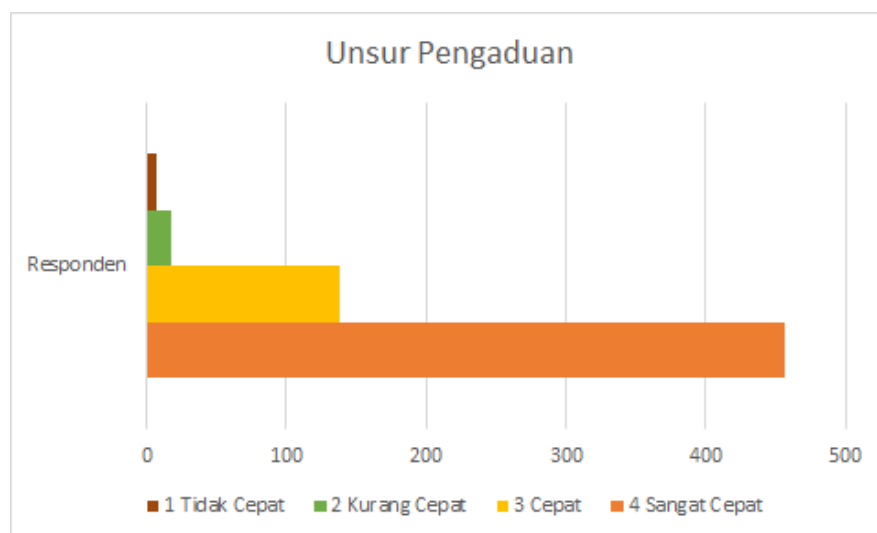
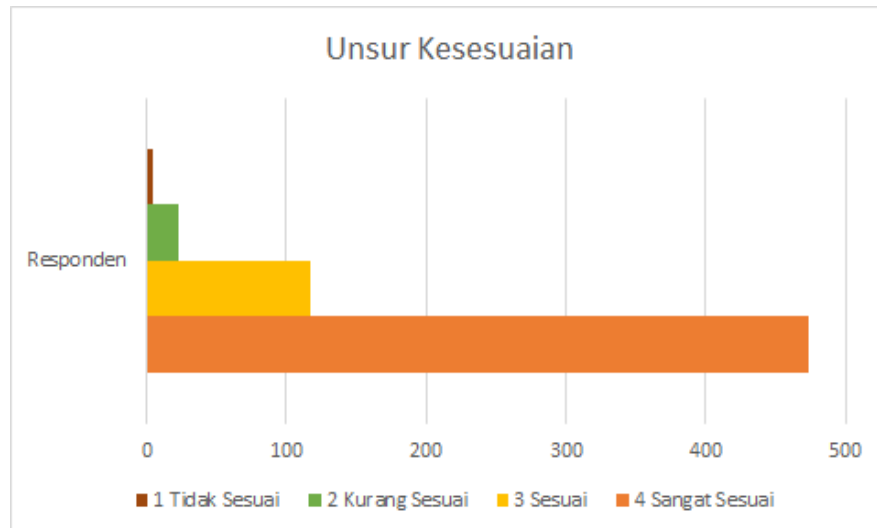
Hasil survey



Hasil survey



Hasil survey



Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Layanan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan per unsur tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

UNSUR SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	91,63%	0,407	10,18	A	Sangat Baik
Keramahan dan Kesopanan	93,49%	0,415	10,39		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	90,29%	0,401	10,03		
Kecepatan Layanan	92,19%	0,410	10,24		
Kemudahan Metode	92,76%	0,412	10,31		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	91,42%	0,406	10,16		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	92,92%	0,413	10,32		
Penanganan Pengaduan	92,19%	0,410	10,24		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	93,49%	0,415	10,39		
INDEKS KEPUASAN		3,691	92,26		

No	Program	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat
1	Layanan Bansos Sembako	3,691	92,26	Sangat Baik

Nilai survey kepuasan layanan stakeholder adalah **92,26** atau kategori **Sangat Baik**. Nilai tertinggi diperoleh dari unsur keramahan dan kesopanan petugas serta bebas pungutan dan gratifikasi. Unsur-unsur lain secara garis besar juga mendapatkan nilai yang sangat baik dengan rata-rata nilai diatas 90.

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kepuasan Stakeholder Tahun 2022
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

2022

**CAPAIAN
KINERJA
LAINNYA**



2022



BANTUAN SOSIAL

BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM)

BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM)

LATAR BELAKANG

Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah menaikkan harga Pertalite. Adanya kebijakan pelaksanaan bantuan sosial BLT BBM bertujuan meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli rumah tangga miskin atau rentan sebagai dampak naiknya harga BBM.

SASARAN

BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu dan dilaksanakan di 34 Provinsi dengan 514 kabupaten/kota berasal dari KPM Program Sembako, Program Keluarga Harapan dan KPM Program Keluarga Harapan non penerima bantuan program sembako yang bersumber dari DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

MEKANISME

Penyaluran Bansos dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, melalui 2 kali penyaluran, yaitu:
Tahap 1: September & Oktober
Tahap 2: November & Desember



BESARAN BANTUAN

Nilai bantuan BLT BBM sejumlah Rp 150.000/KPM/bulan selama 4 bulan yaitu pada bulan September, Oktober, November dan Desember

PEMANFAATAN

Bantuan BLT BBM dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat

REALISASI

Per data Februari 2023 sukses salur BLT BBM sebanyak 20.650.000 KPM (100%).

TAHAP	SUKSES SALUR	
	KPM	ANGGARAN
SEPTEMBER	20.650.000	3.097.500.000.000
OKTOBER	20.650.000	3.097.500.000.000
NOVEMBER	20.650.000	3.097.500.000.000
DESEMBER	20.650.000	3.097.500.000.000
TOTAL		12.390.000.000.000

TRANSAKSI	
KPM	ANGGARAN
20.449.784	3.067.467.600.000
20.449.784	3.067.467.600.000
20.650.000	3.097.500.000.000
20.650.000	3.097.500.000.000
	12.329.935.200.000



BANTUAN SOSIAL SEMBAKO ADAPTIF

Latar Belakang

Dalam rangka memberikan penguatan perlindungan sosial dan pemberian bantuan sembako adaptif dan spesifik maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan sembako adaptif dan spesifik berupa barang kepada masyarakat terdampak bencana yang akan difokuskan pada lokasi yang mengalami dampak bencana baik yang sudah terdata dalam DTKS maupun belum terdata dalam DTKS.

Tujuan

Mengefektifkan anggaran biaya jasa salur bantuan sosial sembako yang belum terealisasi. Pemberian bantuan didasarkan atas data masyarakat/keluarga terdampak bencana sebagai penerima bantuan berupa barang atas laporan pemerintah daerah maupun hasil asesment di lapangan.

Nilai Bantuan

Penyaluran bantuan sembako non reguler ini merupakan bantuan langsung berupa barang yang akan disediakan melalui petugas lapangan yang ditunjuk secara langsung sebagai asesment awal untuk langkah penanganan kedaruratan saat terjadi bencana di wilayah/lokasi terdampak.

Besaran senilai Rp 200.000,- diberikan kepada keluarga terdampak bencana sebanyak 26.177 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

SASARAN



Keluarga kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak, ibu hamil atau menyusui, disabilitas, orang sakit dan lanjut usia, Yatim Piatu (YAPI), korban bencana alam non alam dan bencana sosial yang memiliki resiko sosial

MEKANISME

Pemberian bantuan didasarkan atas data masyarakat/keluarga terdampak bencana/KPM dalam situasi khusus/musibah sebagai penerima bantuan berupa uang tunai yang diberikan melalui PT. Pos Indonesia



REALISASI



Penyaluran Bantuan Sembako Adaptif bagi kelompok Rentan Tahun 2022 sebanyak 15.945 KPM (60.9%)



REALISASI ANGGARAN

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan awalnya sebesar Rp 14.742.125.743.000, kemudian mengalami revisi untuk penambahan biaya bansos dan distribusi BLT BBM sebesar 12.962.005.000.000 menjadi 27.704.130.743.000

Dalam rangka biaya distribusi untuk 83 kab/kota yang belum memiliki infrastruktur penyaluran bantuan sosial secara non tunai, melalui penambahan anggaran sebesar 486.875.545.000 sehingga menjadi Rp 28.191.006.288.000

PAGU Rp 28.191.006.288.000

REALISASI Rp 28.047.596.940.329

99.49%

CAPAIAN ANGGARAN

ANALISIS EFISIENSI

PENGUNAAN ANGGARAN

Nilai efisiensi anggaran tahun 2022 adalah 99,49%, maka realisasi anggaran penyelenggaraan program sembako adalah efisien.

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako yang terkait dengan jasa distribusi bantuan sosial sembako dianggarkan sebesar Rp 56.673.731.000, dan yang terealisasi adalah sebesar Rp 35.402.495.625 dengan persentase sebesar 62,47%. Hal ini mendukung tercapainya efisiensi anggaran.

Penyaluran bantuan BLT BBM yang dilakukan secara bersamaan dengan penyaluran bantuan sembako juga merupakan cara untuk mendukung tercapainya anggaran yang ekonomis.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, namun dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa dinamika tantangan. Untuk itu, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan harus mampu beradaptasi memberikan pelayanan yang terbaik dengan terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mendukung tujuan organisasi.

Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

TINDAK LANJUT

Langkah perbaikan yang akan ditempuh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan pada tahun berikutnya adalah:

- memperkuat sinergi antar satuan kerja, mitra dan seluruh stakeholder
- penguatan database dengan optimalisasi teknologi informasi untuk menunjang tugas dan fungsi
- penguatan kapasitas pegawai Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
- penetapan taret kinerja yang berorientasi pada outcome atau impact

PAGU ANGGARAN



Lampiran I.a
Surat Bersama Pagu Anggaran
Belanja K/L TA 2022

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2022

BA : 027
K/L : KEMENTERIAN SOSIAL

(Dalam Ribu Rupiah)

KODE	PROGRAM DAN SUMBER DANA	RINCIAN PAGU ANGGARAN TA 2022		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PAGU INDIKATIF TA 2022		752.902.286	77.503.424.835	78.256.327.121
a.	RM	752.902.286	77.497.286.466	78.250.188.752
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	6.188.869	6.188.869
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
027.WA Program Dukungan Manajemen		782.035.462	314.991.184	1.097.026.646
a.	RM	782.035.462	309.851.790	1.091.887.252
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	5.659.594	5.659.594
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-



Lampiran I.a
Surat Bersama Pagu Anggaran
Belanja K/L TA 2022

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2022

BA : 027
K/L : KEMENTERIAN SOSIAL

(Dalam Ribu Rupiah)

KODE	PROGRAM DAN SUMBER DANA	RINCIAN PAGU ANGGARAN TA 2022		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
027.DQ Program Perlindungan Sosial		-	77.159.300.475	77.159.300.475
a.	RM	-	77.158.801.500	77.158.801.500
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	498.975	498.975
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
B. PERUBAHAN/TAMBAHAN ANGGARAN		-	-	-
a.	RM	-	-	-
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	-	-
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-



Lampiran I.a
Surat Bersama Pagu Anggaran
Belanja K/L TA 2022

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2022

BA : 027
K/L : KEMENTERIAN SOSIAL

(Dalam Ribu Rupiah)

KODE	PROGRAM DAN SUMBER DANA	RINCIAN PAGU ANGGARAN TA 2022		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. JUMLAH PAGU ANGGARAN TA 2022		782.035.462	77.474.291.659	78.256.327.121
a.	RM	782.035.462	77.468.182.290	78.250.188.752
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	6.188.869	6.188.869
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-

I. Pagu Anggaran Termasuk :

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) | 517.628.471 |
| 2. | Belanja Operasional Barang (komponen 002) | 264.406.991 |
| 3. | Program Keluarga Harapan untuk 10 juta KPM (Bancos) | 28.709.816.300 |
| 4. | Kartu Sembako untuk 18,6 juta KPM (Bancos) | 45.120.000.000 |

REALISASI ANGGARAN PER DESEMBER 2022

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 027 KEMENTERIAN SOSIAL
Unit Organisasi 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Satuan Kerja : 690566 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	28,191,006,288,000	0	27,590,410,999,299	457,191,541,030	28,047,602,540,329	143,403,747,671
DQ Program Perlindungan Sosial	28,191,006,288,000	0	27,590,410,999,2	457,191,541,030	28,047,602,540,3	143,403,747,671
DQ.6896 Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako	28,191,006,288,000	0	27,590,410,999,2	457,191,541,030	28,047,602,540,3	143,403,747,671
QAH Pelayanan Publik Lainnya	61,963,488,000	0	30,935,954,468	9,735,141,030	40,671,095,498	21,292,392,502
QAH.101 Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	61,963,488,000	0	30,935,954,468	9,735,141,030	40,671,095,498	21,292,392,502
051 Penyusunan Naskah Hukum Bantuan Sosial Sembako	72,900,000	0	72,900,000	0	72,900,000	0
051.0A Rapat Persiapan Penyusunan Produk Hukum Bantuan Sosial Sembako	36,450,000	0	36,450,000	0	36,450,000	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,450,000	0	36,450,000	0	36,450,000	0
051.0B Kegiatan Penyempurnaan / Review dan Penyusunan Petunjuk Teknis	36,450,000	0	36,450,000	0	36,450,000	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,450,000	0	36,450,000	0	36,450,000	0
053 Rekonsiliasi Bantuan Sosial Sembako	220,238,000	0	109,350,000	110,058,000	219,408,000	830,000
053.0A Rekonsiliasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako	110,150,000	0	109,350,000	0	109,350,000	800,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	110,150,000	0	109,350,000	0	109,350,000	800,000
053.0B Rekonsiliasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dengan dan Hibara	110,088,000	0	0	110,058,000	110,058,000	30,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	110,088,000	0	0	110,058,000	110,058,000	30,000
054 Uji Coba Terpadu Digitalisasi dan Integrasi Bantuan Sosial Sembako	80,680,000	0	80,669,000	0	80,669,000	11,000
054.0A Tindak Lanjut atas Pemeriksaan BPK	80,680,000	0	80,669,000	0	80,669,000	11,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	80,680,000	0	80,669,000	0	80,669,000	11,000
055 Quick Respon Bantuan Sosial Sembako	138,966,000	0	138,965,240	0	138,965,240	100,760
055.0A Quick Response	138,966,000	0	138,965,240	0	138,965,240	100,760
522141 Belanja Sewa	6,800,000	0	6,750,000	0	6,750,000	50,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132,166,000	0	132,115,240	0	132,115,240	50,760
056 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Sembako	1,202,432,000	0	1,201,896,620	0	1,201,896,620	545,380
056.0A Asistensi Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial	634,800,000	0	634,800,000	0	634,800,000	0
522141 Belanja Sewa	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0
522151 Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2022

Kementerian : 027 KEMENTERIAN SOSIAL
Unit Organisasi 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Satuan Kerja : 690566 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Hal 2 dari 3

	Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Lock Pagu	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	623,800,000	0	623,800,000	0	623,800,000	100.00
056.0B	Monitoring dan Evaluasi Program	567,632,000	0	567,086,620	0	567,086,620	99.90 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	567,632,000	0	567,086,620	0	567,086,620	99.90 %
057	Dukungan Manajemen Bantuan Sosial Sembako	3,574,541,000	0	1,665,634,108	1,889,236,905	3,554,871,013	99.45 %
057.0A	Penataan Administrasi Lingkup Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	106,150,000	0	105,850,000	0	105,850,000	99.72 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	106,150,000	0	105,850,000	0	105,850,000	99.72 %
057.0B	Sinergitas dan Kunjungan Kerja	2,102,048,000	0	1,071,184,316	1,022,200,692	2,093,385,008	99.59 %
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	95,000,000	0	57,620,918	37,201,446	94,822,364	99.81 %
522141	Belanja Sewa	204,322,000	0	76,338,000	125,900,000	202,238,000	98.98 %
522151	Belanja Jasa Profesi	142,800,000	0	104,100,000	35,700,000	139,800,000	97.90 %
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	370,000	0	350,000	0	350,000	94.59 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,642,276,000	0	824,435,398	814,759,246	1,639,194,644	99.81 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,280,000	0	8,340,000	8,640,000	16,980,000	98.26 %
057.0C	Asistensi Program dan anggaran	383,100,000	0	245,542,192	135,485,242	381,027,434	99.46 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	377,580,000	0	241,372,192	135,485,242	376,857,434	99.81 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,520,000	0	4,170,000	0	4,170,000	75.54 %
057.0D	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan	232,611,000	0	159,787,600	70,229,550	230,017,150	98.88 %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	22,800,000	0	12,800,000	9,954,500	22,754,500	99.80 %
521211	Belanja Bahan	209,211,000	0	146,687,600	60,275,050	206,962,650	98.93 %
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	600,000	0	300,000	0	300,000	50.00 %
057.0E	Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI	515,730,000	0	0	512,605,712	512,605,712	99.39 %
521211	Belanja Bahan	2,200,000	0	0	600,000	600,000	27.27 %
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	176,550,000	0	0	176,075,500	176,075,500	99.73 %
522141	Belanja Sewa	56,250,000	0	0	55,993,000	55,993,000	99.54 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232,790,000	0	0	231,997,212	231,997,212	99.66 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47,940,000	0	0	47,940,000	47,940,000	100.00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 027 KEMENTERIAN SOSIAL
Unit Organisasi 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Satuan Kerja : 690556 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Hal 3 dari 3

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2022		SISA	
					Periode Ini	s.d. Periode	%	ANGGARAN
057.0F	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LINGKUP DITJEN DAYASOS	234,902,000	0	83,270,000	148,715,709	231,985,709	98.76 %	2,916,291
521211	Belanja Bahan	272,000	0	0	0	0	0.00 %	272,000
522141	Belanja Sewa	27,000,000	0	8,400,000	18,250,000	26,650,000	98.70 %	350,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	207,630,000	0	74,870,000	130,465,709	205,335,709	98.90 %	2,294,291
058	Jasa Distribusi Bantuan Sosial Sembako	56,673,731,000	0	27,666,649,500	7,735,846,125	35,402,495,625	62.47 %	21,271,235,375
058.0A	Penyaluran Bantuan Program Sembako	56,673,731,000	0	27,666,649,500	7,735,846,125	35,402,495,625	62.47 %	21,271,235,375
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	56,673,731,000	0	27,666,649,500	7,735,846,125	35,402,495,625	62.47 %	21,271,235,375
QEB Bantuan Keluarga		28,129,042,800,000	0	27,559,475,044,8	447,456,400,000	28,006,931,444,8	99.57 %	122,111,355,169
QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako (PEN)	15,167,037,800,000	0	14,760,682,570,8	292,964,800,000	15,063,647,370,8	99.25 %	113,390,429,193
051	Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (PEN)	15,167,037,800,000	0	14,760,682,570,8	292,964,800,000	15,063,647,370,8	99.25 %	113,390,429,193
051.0A	Penyaluran Bantuan Sosial Sembako	14,673,925,400,0	0	14,267,570,200,0	292,964,800,000	14,560,535,000,0	99.23 %	113,390,400,000
575114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	14,673,925,400,0	0	14,267,570,200,0	292,964,800,000	14,560,535,000,0	99.23 %	113,390,400,000
051.0B	Biaya Jasa Distribusi Penyaluran Sembako	493,112,400,000	0	493,112,370,807	0	493,112,370,807	100.00	29,193
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	493,112,400,000	0	493,112,370,807	0	493,112,370,807	100.00	29,193
QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM (PEN)	12,962,005,000,000	0	12,798,792,474,0	154,491,600,000	12,953,284,074,0	99.53 %	6,720,925,976
051	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM (PEN)	12,962,005,000,000	0	12,798,792,474,0	154,491,600,000	12,953,284,074,0	99.53 %	6,720,925,976
051.0A	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM	12,390,000,000,000	0	12,235,508,400,0	154,491,600,000	12,390,000,000,0	100.00	0
575114	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	12,390,000,000,000	0	12,235,508,400,0	154,491,600,000	12,390,000,000,0	100.00	0
052	Biaya Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM (PEN)	572,005,000,000	0	563,284,074,024	0	563,284,074,024	98.48 %	8,720,925,976
052.0A	Biaya Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM	572,005,000,000	0	563,284,074,024	0	563,284,074,024	98.48 %	8,720,925,976
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	572,005,000,000	0	563,284,074,024	0	563,284,074,024	98.48 %	8,720,925,976

"Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



BERITA ACARA REKONSILIASI



**BERITA ACARA REKONSILIASI
PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO
PERIODE OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2022
A N T A R A
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI
D E N G A N
PT POS INDONESIA (PERSERO)**

Nomor : 62/5.4/BS.01.02/01/2023
Nomor : 55/TP-BPS/0123

Berdasarkan:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) nomor: 06/5/PKS/HK.01/8/2022 dan nomor: 152/DIR-4/0822 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyaluran Program Sembako Tahun 2022;
2. Addendum Perjanjian Kerja Sama nomor: 08/5/PKS/HK.01/9/2022 dan nomor: 174/DIR-4/0922 tanggal 8 September 2022 tentang Penyaluran Program Sembako Tahun 2022,
3. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI nomor: ... tanggal .. tentang Penugasan ...;

maka pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (10-01-2023), dilakukan rekonsiliasi Penyaluran Program Sembako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1. PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan realisasi Penyaluran Program Sembako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 per tanggal 9 Januari 2023 dengan rincian sesuai tabel berikut :

**Tabel 1.1
Rekap Realisasi Penyaluran Program Sembako
Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022**

NO	NO SI SEMBAKO	TANGGAL SI SEMBAKO	ALOKASI	BERHASIL SALUR s.d 31-12-2022	BERHASIL SALUR s.d 09-01-2023	BERHASIL SALUR 1-9	GAGAL SALUR	PERSENTASE
A	B	C	D	E	F	G=F-E	G=D-F	H=G/D
1	1126/5.4/BS.01.02/11/2022	21/11/2022	28.310.783	18.234.583	18.234.583	0	76.200	99,99%
2	1272/5.4/BS.01.02/12/2022	02/12/2022	111.524	108.809	108.809	0	3.715	97,23%
3	1286/5.4/BS.01.02/12/2022	01/12/2022	28.045	26.615	26.625	0	1.430	94,90%
4	1396/5.4/BS.01.02/12/2022	12/12/2022	9.790	6.182	6.229	37	3.568	63,61%
5	1578/5.4/BS.01.02/12/2022	29/12/2022	152.416	122.912	122.444	132	31.972	79,02%
6	1634/5.4/BS.01.02/12/2022	29/12/2022	621	-	569	569	53	91,46%
7	1685/5.4/BS.01.02/12/2022	30/12/2022	176.750	-	360.944	160.944	15.806	91,06%
Grand Total			28.790.332	11.496.511	28.658.193	161.682	132.139	99,50%



BERITA ACARA REKONSILIASI

Berdasarkan data realisasi KPM dari tabel 1.1 di atas, maka dana yang telah disalurkan dapat diuraikan pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Realisasi Dana Penyaluran Program Sembako
Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022

NO	NO SI SEMBAKO	TANGGAL SI SEMBAKO	ALOKASI	BERHASIL SALUR s.d 30-12-2022	BERHASIL SALUR s.d 09-01-2023	BERHASIL SALUR 1-9 Januari 2023	GAGAL SALUR	PERSENTASE
A	B	C	D	E	F	G=F-E	G-D-F	H=F/D
1	1126/S.4/RS.01.02/11/2022	21/11/2022	10.986.469.800.000	10.940.749.800.000	11.943.749.800.000	-	45.720.000.000	99,58%
2	1272/S.4/RS.01.02/12/2022	05/12/2022	67.154.400.000	65.285.400.000	65.285.400.000	-	1.869.000.000	97,22%
3	1286/S.4/RS.01.02/12/2022	01/12/2022	26.627.000.000	15.969.000.000	15.969.000.000	-	858.000.000	94,90%
4	1385/S.4/RS.01.02/12/2022	12/12/2022	5.875.200.000	3.775.200.000	3.730.400.000	21.200.000	2.137.800.000	63,61%
5	1578/S.4/RS.01.02/12/2022	29/12/2022	91.449.600.000	72.187.200.000	72.266.400.000	79.200.000	19.183.200.000	79,02%
6	1654/S.4/RS.01.02/12/2022	29/12/2022	373.200.000	-	341.400.000	341.400.000	31.800.000	91,48%
7	1685/S.4/RS.01.02/12/2022	30/12/2022	126.090.000.000	-	96.566.400.000	96.566.400.000	9.483.600.000	91,66%
Grand Total			11.274.196.200.000	11.097.936.600.000	11.194.915.800.000	97.009.200.000	79.283.400.000	99,30%

Berdasarkan data realisasi KPM dari tabel 1.1 di atas, berikut ini penjelasan mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Pensero):

Tabel 1.3
Penjelasan Mekanisme Penyaluran Program Sembako
Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022

NO	NO SI SEMBAKO	TANGGAL SI SEMBAKO	MEKANISME PEMBAYARAN			TOTAL
			ANTARAN LANGSUNG	KOMUNITAS	OUTLET KANTOR POS	
A	B	C	D	E	F	G=SUM(D-F)
1	1126/S.4/RS.01.02/11/2022	21/11/2022	423.695	11.623.588	6.187.303	18.234.583
2	1272/S.4/RS.01.02/12/2022	02/12/2022	7.762	21.467	79.580	108.809
3	1286/S.4/RS.01.02/12/2022	01/12/2022	2.628	4.825	19.162	26.615
4	1385/S.4/RS.01.02/12/2022	12/12/2022	594	1.027	4.608	6.229
5	1578/S.4/RS.01.02/12/2022	29/12/2022	10.434	22.370	87.640	120.444
6	1654/S.4/RS.01.02/12/2022	29/12/2022	106	103	357	566
7	1685/S.4/RS.01.02/12/2022	31/12/2022	19.344	42.760	98.840	160.944
Grand Total			464.566	11.716.140	6.477.487	18.658.193



Pada Penyeluran Program Sombako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022

[illegible]

BERITA ACARA REKONSILIASI

- PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan data gagal salur dan dana sudah dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

No	NO/SI SEMBAKO	TANGGAL SI SEMBAKO	DANA SUDAH DIBAYARKAN	DISTRIBUSI GAGAL SALUR			
				KPM MANGRO (SIK) RPD KUMON	KPM MANGRO (SIK) RPD KUMON	KPM PBL, TPL, POLA, DPL, POKOK	KPM GUSAN DAPET BANTUAN PROGRAM/BLT
1	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	21/12/2022	4.881	100	1.000	104	184
2	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	02/02/2023	1		1		1
3	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	01/02/2023	31		13		
4	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	22/02/2023					
5	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	28/02/2023					
6	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	29/02/2023					
7	1126/5.4/BS.01.001/12/2022	01/03/2023					
Grand Total			4.912	100	1.014	104	185

Sesuai dengan surat Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial RI nomor: 1517/5.4/DI.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Pengembalian Dana Bantuan Program Sembako dan Program BLT BBM Bulan November – Desember, PT Pos Indonesia (Persero) telah menyetorkan dana gagal salur tersebut sebanyak 4.717 KPM dengan uang sebesar Rp2.830.200.000,- pada tanggal 21 Desember 2022 melalui surat nomor: 1039/TP-BBM1222 perihal Laporan Pengembalian Dana Bantuan Program Sembako dan Program BLT BBM Bulan November – Desember Tahun 2022.

- Berdasarkan data di atas, perhitungan biaya salur atas SI Sembako nomor: 1654/5.4/BS.01.02/12/2022 dan 1685/5.4/BS.01.02/12/2022 yaitu sebagaimana pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Rekapitulasi Penghitungan Biaya Salur
Penyaluran Program Sembako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022

No	Deskripsi	Jumlah KPM	Biaya Salur (Rp)	Jumlah Biaya Salur
1	Realisasi Penyaluran SI 1654/5.4/BS.01.02/12/2022	544	13.713	7.802.887
2	Realisasi Penyaluran SI 1685/5.4/BS.01.02/12/2022	160.944	13.713	2.207.025.072
TOTAL				2.214.827.959

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka biaya salur atas Penyaluran Program Sembako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebanyak 161.488 KPM yaitu senilai Rp2.214.827.769,- (dua miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial RI akan melakukan pembayaran setelah alokasi anggaran tersedia pada tahun 2023.

- PT Pos Indonesia (Persero) akan mengembalikan Dana Program Sembako Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 yang gagal salur sesuai tabel 1.2 sejumlah 127.422 KPM sebesar Rp76.453.200.000,- (Tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan instruksi pengembalian dari Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial RI yang dilampiri dengan e-billing.
- PT Pos Indonesia (Persero) akan melaporkan jasa giro atas rekening Program Sembako Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 kepada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial RI tanggal 11 Januari 2023.
- Data BNBA dan geotagging dapat diunduh melalui SFTP dengan IP 103.123.39.232 Port 2288 dengan folder /rekon/BLT BBM/TAHAP 2/cut off time 09-01-23/. Untuk akses lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Kheni Ayundarsi (Telp/WA: 081395171189).



BERITA ACARA REKONSILIASI

Demikian poin-poin Berita Acara untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak dan sifatnya mengikat. Apabila ada perubahan akan dibahas bersama-sama.

Penyuluh Sosial Ahli Muda
Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
Kementerian Sosial RI



Hadi Waluyo

Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
Kementerian Sosial RI



Eka Suhartini

Ketua Tim Pelaksana Program Sembako Tahun
2022

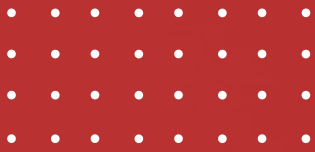
PT Pos Indonesia (Persero)



Hendra Sari



DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL** **2022**

